

# **PENINGKATAN KEMAMPUAN PENATA USAHAAN DAN PELAPORAN BAGI APARAT PENGELOLAAN KEUANGAN PUSKESMAS GEDONG AIR**

Eka Nurzanah<sup>1</sup>

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Sosial dan Bisnis  
Universitas Aisyah Pringsewu  
Email: ekanurzanah67@gmail.com

## **ABSTRAK**

Laporan keuangan untuk pemerintah daerah dibuat untuk memberikan rincian yang relevan tentang situasi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan dalam satu periode pelaporan. Pemerintah daerah harus memiliki berbagai aspek sebagai penunjang dalam melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan khususnya standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berlaku. Mayoritas pelaksana penatausahaan dan pelaporan keuangan di puskesmas gedong air tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sehingga mengalami kesulitan dalam membuat pertanggungjawaban atau laporan keuangan. Oleh karena itu, menjadi satu hal yang penting untuk melakukan pelatihan dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan aparat pengelola keuangan puskesmas gedong air mengenai pengelolaan keuangan khususnya penatausahaan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan SAP. Kegiatan pelatihan menggunakan teknik penyampaian materi, diskusi, dan studi kasus pengelolaan keuangan. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan puskesmas gedong air dalam mengelola dan melaporkan aktivitas keuangan telah meningkat.

**Kata Kunci** : Penatausahaan, pelaporan, pengelolaan keuangan, standar akuntansi pemerintahan

## **1. PENDAHULUAN**

Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menunjukkan komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi sistem pemerintahan sentralisasi menuju desentralisasi dengan memberikan kepada daerah kewenangan lebih, termasuk kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Tujuan undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, yang lebih penting dari sekedar pengalihan kewenangan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Aparat pengelola keuangan dituntut untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang relevan handal, diperbandingkan dan dapat dipahami serta dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam sektor publik, prinsipal dalam hal ini adalah masyarakat, yakni sebagai pemilik sumber daya yang mempunyai kepentingan dan membutuhkan informasi. Publik dalam konteks ini, masyarakat umum yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/DPRD). Publik yang bertindak sebagai pemilik dana dalam kapasitas sebagai prinsipal yang kemudian berhak dan berwenang meminta

pertanggungjawaban agen (pemerintah). Berdasarkan prinsip inilah kemudian undang-undang mengharuskan pemerintah mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada masyarakat. Konflik kepentingan timbul oleh karena prinsipal tidak dapat memonitor aktivitas agen sehari-hari untuk memastikan bahwa agen telah bekerja sesuai dengan keinginan prinsipal. Agen mengetahui lebih banyak tentang bisnis dan prinsipal, dalam hal ini tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kinerja agen. Asimetri informasi adalah istilah untuk terjadinya ketidakseimbangan informasi ini. Konflik dapat muncul di sektor publik karena pemerintah yang dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih oleh masyarakat tidak memberikan pelayanan publik seperti yang diharapkan masyarakat (Kusuma & Handayani, 2017).

Laporan Keuangan harus dibuat dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah untuk mengumpulkan data ini. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah mengatur lebih lanjut teknis penerapan kedua undang-undang tersebut. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan terbuka merupakan hasil dari Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, dan Permendagri. Penelitian Aliyah & Nahar (2012) dan Apriliani, dkk., (2015) menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan dipengaruhi secara positif oleh penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

SKPD wajib menyusun laporan keuangan sebagai entitas akuntansi yang meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang dituangkan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, semua laporan harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrua.

Puskesmas Gedong Air sebagai sebagai salah satu kelompok kerja di lingkungan pemerintah lampung. Puskesmas mengawasi pengeluaran dana baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, dalam melakukan administrasi dan pelaporan keuangan mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara. Pemerintah kabupaten/kota menghitung penerimaan pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) oleh unit-unit puskesmas yang beroperasi di bawah kendalinya sebagai pendapatan. Namun penggunaan dana BOK yang dialihkan kepuskesmas dalam bentuk belanja yang merupakan komponen satuan kerja kabupaten/kota, yang kinerjanya merupakan bagian dari kinerja kabupaten/kota. Artinya, setiap instansi kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib memberikan laporan keuangan BOK setiap tahunnya yang berbasis akrua agar supaya dapat dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang sebagai satu kesatuan pelaporan keuangan yang komprehensif.

Untuk dapat melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu ditunjang oleh berbagai aspek yang perlu dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai penunjang pelaksanaan. Aspek-aspek tersebut diantaranya adalah sumber daya manusia (SDM)

yang berkualitas, paket regulasi yang relevan dan infrastruktur yang mengalami perubahan di setiap tahunnya. Masalahnya, penunjang pelaksana khusus SDM di Puskesmas Gedong Air memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sehingga mengalami kesulitan dalam membuat pertanggung jawaban atau laporan keuangan penggunaan dana BOK.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti melakukan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas personil yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang Akuntansi dan Pelaporan baik Pegawai Negeri Sipil yang sebagai pejabat struktural maupun honorer yang bertugas sebagai bendahara dan operator di Puskesmas dalam bentuk kegiatan pelatihan implementasi SAP Berbasis Akruwal. Pelatihan ini diselenggarakan dalam bentuk peningkatan wawasan yang menyeluruh untuk melaksanakan tugas penyusunan laporan keuangan pemerintah dengan basis akuntansi akrual sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sampel yaitu 35 anggota pegawai Puskesmas Gedong Air. Keberadaan dan kemampuan para anggota pegawai Puskesmas Gedong Air diharapkan dapat meningkatkan wawasan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah dengan basis akuntansi akrual. Metode pelaksanaan penelitian ini adalah dengan mengadakan pelatihan di Puskesmas Gedong Air Jl. Sisingamangaraja, sGedong Air, Kecamatan. Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data yaitu : 1) teknik persiapan, tahap menganalisa masalah dan kebutuhan. Pada tahap ini mengidentifikasi masalah dan mencari upaya untuk membantu mengatasi permasalahan SDM dalam Puskesmas Gedong Air Lampung. 2) Teknik kedua yaitu pelaksanaan, terbagi menjadi 3 sesi yaitu : sesi pertama penyampaian materi mengenai penyusunan laporan keuangan pemerintah dengan basis akuntansi akrual. Selanjutnya dilakukan tanya jawab, yaitu responden dalam hal ini kepala dan pegawai Puskesmas Gedong Air Lampung dapat menanyakan materi yang disampaikan oleh peneliti dilakukan *case study*, yaitu peserta dalam hal ini pegawai puskesmas gedong air menyelesaikan kasus mengenai penyusunan laporan keuangan pemerintah dengan basis akuntansi akrual. 3) Selanjutnya sebagai teknik terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini dilakukan dengan meminta tanggapan dari kepala dan pegawai Puskesmas Gedong Air Lampung atas pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan tanggapan yang diberikan baik dari kepala dan pegawai Puskesmas Gedong Air Lampung menyatakan bahwa pelatihan peningkatan kemampuan penatausahaan dan pelaporan bagi aparat pengelolaan keuangan puskesmas gedong air untuk meningkatkan kemampuan SDM Puskesmas Gedong Air Lampung.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneitian ini menekankan pada model penyampaian materi yang menarik dan diskusi yang interaktif. Penelitian ini terbagi dalam beberapa sesi sebagai berikut:

1. Pembukaan. Pada sesi ini diawali dengan pembukaan dari pembawa acara,

menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan sambutan dari pihak Puskesmas Gedong Air.

2. Sesi Materi. Sesi materi ini meliputi penyampaian materi dan sesi tanya jawab atau diskusi interaktif. Penyampaian materi disampaikan adalah materi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah dengan basis akuntansi akrual yang disampaikan oleh Riska Agi Sawitri, S.E., M.Si.
3. Sesi Penutup. Pada sesi akhir ini ditutup dengan penyampaian terima kasih atas apresiasi perhatian dari para kepala dan pegawai puskesmas gedong air dan diadakan acara doorprize bagi anggota yang bisa menjawab pertanyaan dari peneliti.

Penelitian ini memberikan hasil yang sangat positif yaitu memberikan pengetahuan mengenai pengelolaan persediaan, pengemasan, pemanfaatan aplikasi shopee guna untuk meningkatkan produksi dan penjualan produk srikadi coffee. Hasil dari kegiatan ini dapat diuraikan dalam indikator sebagai berikut:

1. Peserta dapat mengikuti dengan kondusif dari awal acara hingga akhir.
2. Peserta pegawai puskesmas gedong air memahami pengetahuan tentang gambaran Umum Proses Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. peneliti membantu dalam peningkatan sdm dalam peningkatan pengelolaan keuangan Puskesmas Gedong Air.

Laporan keuangan untuk pemerintah daerah dibuat untuk memberikan rincian yang relevan tentang situasi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan dalam satu periode pelaporan. Pemerintah daerah harus memiliki berbagai aspek sebagai penunjang dalam melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan khususnya standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berlaku. Mayoritas pelaksana penatausahaan dan pelaporan keuangan di puskesmas gedong air tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sehingga mengalami kesulitan dalam membuat pertanggungjawaban atau laporan keuangan. Oleh karena itu, menjadi satu hal yang penting untuk melakukan pelatihan dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan aparat pengelola keuangan puskesmas gedong air mengenai pengelolaan keuangan khususnya penatausahaan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan SAP. Kegiatan pelatihan menggunakan teknik penyampaian materi, diskusi, dan studi kasus pengelolaan keuangan.

Untuk dapat melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu ditunjang oleh berbagai aspek yang perlu dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai penunjang pelaksanaan. Aspek-aspek tersebut diantaranya adalah sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, paket regulasi yang relevan dan infrastruktur yang mengalami perubahan di setiap tahunnya. Masalahnya, penunjang pelaksana khusus SDM di Puskesmas Gedong Air memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sehingga mengalami kesulitan dalam membuat pertanggung jawaban atau laporan keuangan penggunaan dana BOK.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti melakukan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas personil yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang Akuntansi dan Pelaporan baik Pegawai Negeri Sipil yang sebagai pejabat struktural maupun honorer yang bertugas sebagai bendahara dan operator di Puskesmas dalam bentuk kegiatan pelatihan implementasi SAP Berbasis Akrual. Pelatihan ini diselenggarakan dalam bentuk peningkatan wawasan yang menyeluruh

untuk melaksanakan tugas penyusunan laporan keuangan pemerintah dengan basis akuntansi akrual sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4. PENUTUP**

Laporan keuangan untuk pemerintah daerah dibuat untuk memberikan rincian yang relevan tentang situasi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan dalam satu periode pelaporan. Pemerintah daerah harus memiliki berbagai aspek sebagai penunjang dalam melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan khususnya standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berlaku. Mayoritas pelaksana penatausahaan dan pelaporan keuangan di puskesmas gedong air tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sehingga mengalami kesulitan dalam membuat pertanggungjawaban atau laporan keuangan. Oleh karena itu, menjadi satu hal yang penting untuk melakukan pelatihan dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan aparat pengelola keuangan puskesmas gedong air mengenai pengelolaan keuangan khususnya penatausahaan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan SAP. Kegiatan pelatihan menggunakan teknik penyampaian materi, diskusi, dan studi kasus pengelolaan keuangan. Berdasarkan hasil dari Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penatausahaan dan Pelaporan bagi Aparat Pengelolaan Keuangan Puskesmas Gedong Air, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peserta dapat mengikuti dengan kondusif dari awal acara hingga akhir.
2. Peserta pegawai puskesmas gedong air memahami pengetahuan tentang gambaran Umum Proses Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peserta pegawai memperoleh pemahaman tentang sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual.
4. Peserta pegawai puskesmas gedong air dapat melaksanakan praktek simulasi pembukuan dan penyusunan laporan penggunaan dana BOK Berbasis Akrual.

#### **Saran**

Beberapa saran dan masukan yang dapat diberikan yakni sebagai berikut:

1. Dengan bertambahnya pengetahuan dan informasi pegawai tentang peningkatan pengelolaan keuangan Puskesmas Gedong Air mampu menghasilkan laporan keuangan yang relevan handal, diperbandingkan dan dapat dipahami serta dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.
2. Kegiatan penelitian melalui pelatihan dapat dilakukan tindak lanjut untuk meningkatkan SDM pegawai puskesmas gedong air dan sebagai referensi penelitian kedepan dengan melakukan analisa penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

#### **REFERENSI**

- Aliyah, S., & Nahar, A. (2012), Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara, Jurnal

Akuntansi & Auditing, Volume 8/No. 2/Mei 2012: 97-189

Kusuma, A. R. & Handayani, N. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6 (1): 403–420.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah